



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Teori Agensi

Hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut (Jensen and Meckling, 1976). Hubungan ini tidak selalu harmonis, memang, teori keagenan berkaitan dengan konflik *agency*, atau konflik kepentingan antara agen dan pelaku. *Agency Theory* menimbulkan masalah mendasar dalam organisasi "perilaku mementingkan diri sendiri". Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan bagi dirinya. Ada berbagai cara bahwa manajer dan orang dalam lainnya dapat memanfaatkan keunggulan informasi mereka dengan menggunakan orang luar, misalnya dengan *biasing* atau mengelola informasi yang dirilis kepada investor (William Scott, 1995:3). Karena manajer tanpa kepemilikan saham, sebuah potensi konflik kepentingan muncul antara dua kelompok.

Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Kesenjangan informasi yang dimiliki antara manajemen di satu pihak dengan pengguna laporan keuangan perusahaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang akan menimbulkan risiko informasi bagi pemegang saham dan dapat mempengaruhi kemampuan investor untuk membuat keputusan investasi yang baik (Tuanakotta, 2013:162).

Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance* (Watts, 2003 dalam Errie Kusriadie, 2013).

## B. Laporan keuangan

### 1. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2011:5), definisi laporan keuangan adalah sarana utama dimana perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang-orang di luar perusahaan sebagai sarana untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut James Reeve (2008:17), definisi laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang memberikan informasi berupa ringkasan catatan transaksi perusahaan kepada pengguna yang disusun sesuai dengan keadaan dan transaksi keuangan yang sebenarnya terjadi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan tertulis atas transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama satu periode. Laporan keuangan yang dibuat dengan baik oleh suatu perusahaan akan memudahkan para pengguna laporan untuk mengerti maksud dari laporan tersebut dan memudahkan pengguna laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan harus juga sesuai dengan keadaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebenarnya agar dapat diandalkan oleh para penggunanya dan tidak merugikan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut, serta sesuai dengan keadaan dan transaksi keuangan yang sebenarnya terjadi.

## 2. Tujuan Laporan Keuangan

Dalam British English (termasuk Inggris), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan semua informasi keuangan yang relevan dari kegiatan bisnis suatu badan atau perorangan dan disajikan secara terstruktur dalam bentuk yang mudah dimengerti dengan analisa dan pembahasan manajemen ([www.princeton.edu](http://www.princeton.edu)).

Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2012) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; (3) ekuitas; (4) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan (5) arus kas.

### C. Audit Report Lag

Ahmad dan Kamarudin (2002) dalam Aditya Taruna Wijaya (2011) menyatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## 1. Definisi *Corporate Governance*

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Swik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*The Malaysian High Level Finance Committee on Corporate Governance (Securities Commission, 2007:52)* yang dikutip dalam (Norlia Mat Norwani, 2011) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan terhadap meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan akhir mewujudkan nilai jangka panjang pemegang saham , sementara mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lainnya ”

*Corporate governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja ([www.iicg.org](http://www.iicg.org)).

*Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika ([www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)).

*Corporate Governance* adalah subjek yang kompleks, namun intinya adalah bahwa organisasi perlu untuk memiliki struktur pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa ada tidak ada kendala pada manajemen dan organisasi bertindak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk kepentingan para pemegang saham. Struktur ini dimulai dengan dewan direksi.

Ada dua kritik utama dari banyak dewan selama dekade terakhir (Rittenberg, 2008:5):

- a. Dewan sering tidak independen dalam manajemen, anggota dewan baik termasuk mayoritas anggota manajemen atau anggota dewan dipilih oleh manajemen, dan dengan demikian terikat oleh manajemen.
- b. Anggota independen dewan tidak menganggap kepemilikan dalam fungsi audit, tidak mengambil peran aktif dalam pengawasan audit atau dalam keputusan untuk mempertahankan atau mengubah perusahaan audit.

## 2. Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Dalam KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN pasal 3 menyatakan lima prinsip GCG yaitu ([www.iicg.org](http://www.iicg.org)):

- a. *Transparansi (Transparancy)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.
- b. *Kemandirian (Independency)*, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut diyakini dapat membantu memperbaiki tingkat keyakinan para investor baik yang bersifat internasional maupun domestik, mengurangi biaya modal, memperkuat pasar modal, dan menumbuhkan sumber pendanaan yang stabil (Antonius Alijoyo, 2006:8).

## E. Mekanisme *Corporate Governance*

### 1. Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling (1976) dalam Dewanti Oktadella (2011) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi



masalah keagenan dengan manajer dan menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat (Shleifer & Vishny, 1997 dalam Roswita Savitri, 2010). Kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung sebagai konsekuensi dari pengambil keputusan yang salah.

Ross, et al. (1999) dalam Roswita Savitri (2010) menyatakan semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung mengabaikan kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Struktur kepemilikan lebih banyak berada di tangan manajer, maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan. Kepemilikan perusahaan sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan dengan kepemilikan oleh manajer yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Oleh sebab itu dengan adanya kepemilikan manajerial sehingga pelaporan keuangan menjadi tepat waktu.

## 2. Kualitas Audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang risiko audit khusus yang mewakili industri tersebut, tetapi akan membutuhkan pengembangan keahlian lebih dari pada auditor pada umumnya. Tambahan keahlian ini akan menghasilkan return positif dalam *fee* audit. Sehingga, para peneliti memiliki hipotesis bahwa auditor dengan konsentrasi tinggi dalam industri tertentu akan memberikan kualitas yang lebih tinggi (Deis and Giroux, 1992 dalam Bunga, 2012).

Penelitian DeAngelo (1981) yang dikutip dari penelitian Dewanti Oktadella (2011) mengemukakan:

“KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil.”

### 3. Frekuensi Rapat Komite Audit

Rapat dan pertemuan komite audit adalah bagian yang sangat penting dalam menjalankan suatu perusahaan sehingga harus direncanakan dan dipersiapkan dengan cukup baik. Ketua komite harus bertanggung jawab atas agenda dengan bahan-bahan pendukung yang diperlukan. Rapat komite audit dilaksanakan paling sedikit setiap tiga bulan sekali dan anggota-anggotanya harus menghadiri rapat-rapat tersebut, termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan. Hasil rapat-rapat harus direkam dalam notulen, dan dibagi-bagikan kepada semua peserta rapat (Antonius Alijoyo, 2006:162).

Rapat dengan pihak luar yang diundang yaitu audit eksternal yang diperlukan setelah audit diselesaikan untuk menyampaikan beberapa hal kepada komite audit yaitu



pembahasan mengenai kecurangan dan tindakan ilegal, kurangnya pengendalian internal, pembahasan lain dengan komite audit, dan surat manajemen. Tujuan dari penyampaian ini adalah agar komite audit dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan mengetahui tentang informasi penting dan relevan mengenai proses laporan keuangan dan memberikan kepada komite audit untuk membahas hal-hal penting dengan auditor sehingga ada komunikasi dua arah antara auditor dengan pihak tata kelola (Randal Elder, 2011:353).

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan corporate governance, memonitor bahwa perusahaan patuh pada code of conduct, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya (Sinta Anggiani, 2011)

#### 4. Komisaris Independen

Komisaris Independen diharapkan memiliki perhatian dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk itu Komisaris Independen perusahaan merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, waktu dan integritas yang tinggi (Emirzon, 2007 dalam Dewanti Oktadella, 2011).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Ukuran kinerja dewan komisaris tidak dapat lagi didasarkan pada kepatuhan terhadap tuntutan “legal” semata, tetapi yang lebih penting adalah apakah dewan komisaris telah menerapkan atau mendemonstrasikan peran pentingnya dalam memberikan kepemimpinan dan pengawasan yang independen serta tidak bertindak berdasarkan inisiatif direksi semata (Antonius Alijoyo, 2006:135).

Komisaris independen memainkan peranan yang aktif dalam peninjauan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan. Komisaris independen diperlukan pada dewan untuk memantau dan mengawasi tindakan dewan direksi karena perilaku oportunistik mereka (Jensen & Meckling, 1976 dalam Roswita Savitri, 2010)

Beasley (1996) dalam Jama’an (2008) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Komisaris independen dapat berperan sebagai pihak netral dan penengah dalam perselisihan diantara para manajer internal dan sebagai pengawas kebijakan manajemen serta pemberi nasihat kepada manajemen. Sehingga dapat dikatakan bahwa komisaris independen secara langsung mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## F. Penelitian Terdahulu

No.	Permasalahan / Isu	Gap Teori	Teori	Pandangan Teori
1.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan kepemilikan manajerial dengan <i>Audit Report Lag</i>	Abdul Kadir (2011)  Indri Hapsari (2009)	Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan  kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
2.	Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap <i>Report Lag</i>	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Rapat Komite Audit dengan <i>Audit Report Lag</i>	Kogilavani Apadore (2013)  Mohammad Naimi (2010)	Rapat Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> .  Pertemuan komite audit lebih sering diadakan, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat mengeluarkan laporan tepat waktu
3.	Pengaruh Kualitas Audit terhadap	Terdapat perbedaan	Mohamad Naimi	Perusahaan yang menggunakan jasa KAP

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p><i>Audit Report Lag</i></p>	<p>pandangan mengenai hubungan Kualitas Audit dengan <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Mohamad-Nor (2010)  Alim Al Ayub Ahmed (2010)</p>	<p><i>Big Four</i> memiliki <i>Audit Report Lag</i> yang pendek.  Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i>.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Komisaris Independen dengan <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Sinta Anggiani (2011)  Kogilavani Apadore (2013)</p>	<p>Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.  Ada pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>

**G. Kerangka Pemikiran**

**1. Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan *Audit Report Lag***

Kepemilikan perusahaan sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan kepemilikan oleh manajer yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola maka hal ini akan memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi keinginan pemegang saham yang tak lain dirinya sendiri (Roswita Savitri, 2011). Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. Oleh sebab itu dengan adanya kepemilikan manajerial memperpendek *audit report lag* laporan keuangan suatu perusahaan. Hasil penelitian yang mendukung teori ini yaitu Abdul Kadir (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

## 2. Hubungan antara Kualitas Audit dengan *Audit Report Lag*

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan firma besar berskala internasional cenderung mempublikasikan kualitas informasi yang tinggi. Di Jordan, perusahaan audit dengan afiliasi internasional yang lebih besar dan didukung oleh tenaga ahli yang lebih teknis dari perusahaan-perusahaan internasional yang mereka berafiliasi daripada perusahaan lokal kecil yang tidak memiliki afiliasi internasional (Kamal Naser, 2007). KAP *The Big Four* umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan KAP *non big four* sehingga dapat melakukan audit dengan lebih cepat dan efisien serta membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Mohamad Naimi Mohamad-Nor (2010) menyatakan bahwa kelompok perusahaan yang memiliki *audit report lag* terpendek memiliki keterlibatan tinggi pada perusahaan audit dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four*. Serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamal Naser (2007) bahwa kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan firma besar berskala internasional memiliki hubungan positif dengan memperpendek *audit report lag*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



### 3. Hubungan antara Rapat Komite Audit dengan *Audit Report Lag*

Dalam Peraturan Bapepam no. IX.I.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan komite audit melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya (www.bapepam.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa komite audit lebih besar lebih mungkin untuk dapat mencurahkan waktu dan usaha untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, dan karenanya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang memadai.

Keahlian komite audit adalah penting dalam untuk menangani secara efektif dengan auditor eksternal, melainkan karena komite audit sering bertindak sebagai mediator antara manajemen dan auditor menghindari segala bentuk keraguan yang timbul dari pihak yang bersangkutan mengenai ketulusan dalam penyusunan abadi dan penyerahan laporan tersebut. (Hasyim dan Abdul Rahman., 2011 dalam Kogilavani Apadore, 2013).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Naimi (2010) menyatakan bahwa pertemuan komite audit lebih sering diadakan, semakin besar kemungkinan komite audit dapat mencapai solusi tentang masalah keuangan dan auditor dapat mengeluarkan laporan tepat waktu dan memperpendek *audit report lag*.

### 4. Hubungan antara Dewan Komisaris dengan *Audit Report Lag*

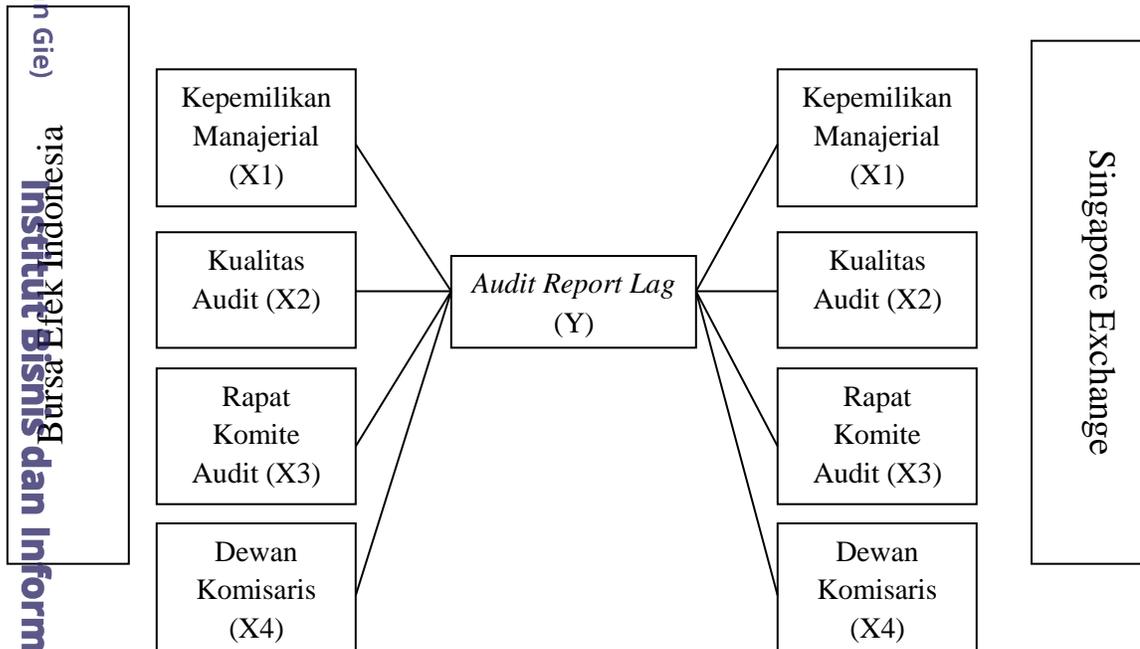
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi kepentingan seluruh stakeholders perusahaan sehingga hal ini dapat mendorong untuk memperpendek *audit report lag*. Menurut (Muntro, 2006 dalam Tita Djuitaningsih, 2011) Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Menurut penelitian Kogilavani Apadore (2013) menunjukkan ada pengaruh signifikan komisaris independen terhadap *audit report lag*.

Dari beberapa uraian tersebut kerangka berfikir digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## H. Hipotesis

Ha1:  Ada perbedaan pengaruh antara Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.

Ha2: Ada perbedaan pengaruh antara Kualitas Audit terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.

Ha3: Ada perbedaan pengaruh antara frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.

Ha4: Ada perbedaan pengaruh antara Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Ha3: Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.